



MIMIKA

MEMBANGUN



Eme Neme Yauware



Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

Pengarah

Bupati Mimika

Penanggungjawab

Kepala Bappeda

Tim Redaksi Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

Anggota :

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



Mimika Membangun Edisi April

Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-8
- Laporan Khusus Hal. 9-18
- Bidang Infrastruktur Hal. 19-23
- Bidang Sosial Budaya Hal. 24-39
- Bidang Ekonomi Hal. 40-44
- Galeri Foto Hal. 45-47





RSUD Mimika Raih Akreditasi Paripurna

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika telah menjalani survey akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) Damar Husada Paripurna. Hasilnya, rumah sakit rujukan regional di wilayah Mee Pago ini berhasil mempertahankan akreditasi Paripurna atau dinyatakan sebagai rumah sakit bintang lima.



Plt Bupati Mimika, Johannes Retto, SSos MM bersama Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu, Sp. THT-KL, MKes dan jajaran manajemen RSUD Mimika, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra serta tim surveyor dari LARS Damar Husada Paripurna.

Foto: Bappeda



Ini merupakan suatu pengakuan kepada RSUD Mimika yang mampu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. “Tanggal 26 April 2023, melalui surat pemberitahuan dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) DHP itu menyampaikan hasil surat dengan lulus paripurna,” ungkap Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu, Sp.THT-KL, MKes. Ini merupakan akreditasi ke-

tiga yang dijalani RSUD Mimika. Pertama di Tahun 2012 oleh LIPA Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2007, dengan hasil lulus tanpa syarat untuk lima pelayanan. Kedua, di Tahun 2018, oleh LIPA KARS untuk Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dengan hasil lulus Paripurna. Kemudian di Tahun 2023 oleh LARS DHP dengan hasil lulus Paripurna.

Lulus paripurna menandakan RSUD Mimika memenuhi standar layanan

bintang lima. Dari 16 bab kriteria penilaian, tentu ada yang mendapat nilai 80 tapi bisa dinyatakan lulus. Namun program nasional yang wajib 100 persen berhasil dipenuhi.

Dalam melakukan akreditasi tim surveyor dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna melakukan survei langsung di RSUD Mimika mulai Jumat (14/3/2023). Kedatangan tim disambut oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM bersama Direktur RSUD Mimika, dr Antonius





Pasulu, Sp.THT-KL, MKes bersama jajaran manajemen RSUD Mimika, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra.

Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu mengatakan akreditasi adalah suatu pengakuan kepada rumah sakit setelah dinilai oleh suatu Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi (LIPA) yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

Akreditasi juga merupakan mandat dari Pemerintah Republik Indonesia kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui proses akreditasi. Ini tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada pasal 40 yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, maka rumah sakit wajib akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali.

Sepanjang sejarah sejak Tahun 2008, RSUD Mimika telah menjalani akreditasi sebanyak dua kali. Pertama di Ta-

hun 2012 oleh LIPA Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2007, dengan hasil lulus tanpa syarat untuk lima pelayanan. Kedua, di Tahun 2018, oleh LIPA KARS untuk Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dengan hasil lulus Paripurna.

Setelah tertunda dua tahun akibat pandemi Covid-19, tahun ini, RSUD Mimika kembali melakukan proses survey akreditasi yang ketiga kalinya. Manajemen bersama seluruh perangkat melakukan persiapan dan berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas pemenuhan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Ada empat kelompok standar yang terdiri dari 16 bab yang dipenuhi. Pertama, kelompok manajemen rumah sakit yang meliputi, tata kelola rumah sakit, kualifikasi dan pendidikan staf, manajemen fasilitas dan keselamatan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen rekam medic dan informasi kesehatan, pencegahan dan pengendalian infeksi, pendidikan dalam

pelayanan kesehatan.

Kedua, kelompok pelayanan berfokus pada pasien yang meliputi akses dan kontinuitas pelayanan, hak pasien dan keterlibatan keluarga, pengkajian pasien, pelayanan dan asuhan pasien, pelayanan anestesi dan bedah, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat serta komunikasi dan edukasi.

Kelompok ketiga, ada sasaran keselamatan pasien. Kelompok keempat adalah program nasional yang meliputi, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberculo-sis (TBC), penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting serta pelayanan keluarga berencana rumah sakit.

Keseluruhan standar Akreditasi Rumah Sait Versi 2022 ini dikatakan Anton terdiri dari 226 standar dan 789 elemen penilaian.

Untuk memenuhi persyaratan itu, RSUD Mimika melengkapi dokumen regulasi seperti kebijakan, panduan/pedoman, standar prosedur operasional, juknis dan lainnya. Memenuhi standar fasilitas sesuai kebutuhan yang berlaku. Melakukan self assessment, serta melakukan penilaian dan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit, standar





mutu pelayanan nasional rumah sakit, standar mutu lokal rumah sakit.

Dalam proses akreditasi, manajemen RSUD Mimika mengikuti bimbingan secara daring maupun luring untuk persiapan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Menyelenggarakan pelatihan internal untuk karyawan RSUD Mimika, menyelenggarakan survey budaya keselamatan pasien pada Bulan Desember 2022 lalu.

Selain itu, RSUD Mimika juga beker-

jasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan seperti Dinkes Mimika, Puskesmas, rumah sakit swasta di Mimika dan lembaga lainnya.

Pemkab Mimika serta masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan dikatakan Anton, akan mendapat manfaat dari akreditasi ini. Sebab dengan akreditasi maka RSUD Mimika akan memiliki sistem tata kelola rumah sakit yang baik, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan keselamatan pasien, pe-

ningkatan keselamatan kerja di lingkungan RSUD Mimika. Ikut menyelesaikan program nasional untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana serta turut serta dalam mengatasi masalah wasting-stunting, TBC dan HIV di Mimika.

Sementara itu Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob menyatakan komitmen Pemkab Mimika dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD Mimika. Sebab RSUD Mimika tidak hanya melayani masyarakat Mimika saja tapi



juga menjadi rumah sakit rujukan di Papua Tengah bahkan juga termasuk Asmat.

Untuk itu ia yakin, dengan inovasi dan terobosan yang dilakukan maka RSUD Mimika bisa mempertahankan pengakuan Paripurna seperti yang sudah didapatkan dari akreditasi sebelumnya.

Kejar Peningkatan Kualifikasi Jadi RS Tipe B

Dengan capaian akreditasi Paripurna menjadi modal besar bagi RSUD Mimika yang sekarang ini masih tipe C bisa meningkatkan kelasnya menjadi rumah sakit tipe B. Selain jumlah layanan yang harus ditambahkan, dalam peningkatan kelas yang paling ditekankan adalah jumlah bed atau tempat tidur. Standarnya untuk tipe B harus lebih dari 200.

“Kita kan ada laporan secara real time setiap hari ke Kementerian Kesehatan tentang jumlah tempat tidur yang ready.

Yang dilaporkan 181 bed untuk ruang rawat inap dan non kelas 36 bed. Yang dihitung adalah kategori rawat inap, kalau non kelas tidak dihitung,” jelasnya.

Anton meyakini syarat ini bisa terpenuhi. Apalagi RSUD Mimika akan kembali membuka gedung A4 yang sempat dijadikan ruang isolasi Covid-19. Penggabungan dua ruang yakni Pipit dan Mambruk jadi satu selama pandemi membuat jumlah bed berkurang. Tapi sekarang tidak ada lagi pasien Covid-19, maka ruangan A4 akan digunakan un-





tuk ruang nifas, sehingga jumlah bed untuk rawat ini tentu bertambah dan bisa melebihi 200.

Peningkatan status RSUD Mimika ke tipe B sebenarnya sudah diusulkan sebelumnya ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Bahkan sudah ada jadwal visitasi. Tapi karena ada pemekaran sehingga manajemen diminta koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta meminta petunjuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah untuk pengajuan peningkatan kelas.

Kenaikan tipe B sangat diperjuangkan agar bisa menambah beberapa layanan. Sekarang ini RSUD Mimika memiliki 11 layanan spesialis untuk poli rawat jalan. Ditambah penunjang ada anastesi, laboratorium, radiologi, patologi anatomi. Salah satu layanan unggulan sekarang adalah hemodialisa atau cuci darah dan menjadi satu-satunya di Papua. RSUD Mimika menargetkan bisa menghadirkan layanan kemoterapi namun itu hanya bisa dilakukan rumah sakit tipe B.

Kebutuhan masyarakat di Papua akan layanan tersebut sangat urgen. Sebab

tidak hanya melayani Mimika, RSUD jadi rujukan regional di wilayah adat Mee Pago. Bahkan tidak hanya itu rujukan dari Asmat yang masuk wilayah adat Anim Ha, juga dari Kaimana dan Fakfak wilayah adat Domberai datang berobat di Timika.

Di tengah pencapaian itu, Anton juga menyadari akan adanya keluhan atau komplain dari masyarakat. Ini juga menjadi salah satu elemen penilaian akreditasi tentang bagaimana mengatasi komplain hingga evaluasi dan perbaikan.

Terlebih di era jaminan sosial kesehatan. Yang sering dihadapi adalah minimnya pemahaman pasien tentang alur pelayanan. Dimana tahapan pengobatan harus dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, setelah FKTP tidak mampu baru dirujuk ke RS. Kecuali dalam keadaan emergency bisa langsung ke IRD yang buka 24 jam.

Kategori emergency pun tidak semuanya bisa dicover oleh BPJS Kesehatan. Seperti kecelakaan dalam kondisi mabuk. Tapi bukan berarti RSUD

tidak melayani. Keselamatan dan pelayanan pasien tetap jadi prioritas.

"Itu tidak akan terklaim oleh BPJS makanya kadang-kadang pasien complain ke rumah sakit. Kami hanya pemberi layanan, penjamin itu BPJS Kesehatan, jadi seharusnya ditanyakan ke BPJS Kesehatan sebagai pihak penjamin," jelas Anton.

Sehingga RSUD Mimika selalu berkoordinasi dan meminta BPJS Kesehatan memberikan sosialisasi kepada peserta tentang hak dan kewajibannya. Terutama jenis penyakit atau layanan yang bisa dijamin.

Di era JKN ini juga memudahkan RSUD Mimika untuk bisa merujuk pasien ke rumah sakit di daerah lain karena BPJS Kesehatan berlaku nasional. Tergantung pilihan pasien ingin dirujuk kemana. Untuk orang asli Papua yang didanai Otsus melalui Kartu Papua Sehat sebagian besar dirujuk ke RSUD Dok II Jayapura. Namun RSUD Mimika tengah menjajaki kerjasama dengan RS lain di luar Papua agar pasien bisa langsung dirujuk. (BAPPEDA)





Musrenbang RKPD Hasilkan 2.357 Kegiatan dengan Pagu Rp 5,2 Triliun

MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang nantinya dituangkan jadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menghasilkan pembahasan 2.357 kegiatan dengan pagu Rp5.216.060.833.534.



Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2024.

Foto: Bappeda



Musrenbangda yang digelar selama tiga hari mulai Senin-Rabu (3-5/4/2023) resmi dibuka oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM. Pembukaan kegiatan di Hotel Horison Diana

Timika itu juga dihadiri Forkopimda, Kepala Bappeda Provinsi Papua Tengah, Ukkas, Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi, Pimpinan dan Anggota DPRD Mimika, para pimpinan OPD,

pimpinan BUMN, BUMD serta instansi vertikal di Mimika.

Kemudian ditutup pada Rabu (5/4/2023) oleh Penjabat Sekda Mimika, Petrus Yumte sekaligus penandatanganan berita acara hasil rumusan Musrenbang oleh Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dan dihadiri anggota DPRD Mimika serta pimpinan dan perwakilan OPD.

Plt Bupati, Johannes Rettob menyampaikan beberapa arahan salah satunya menekankan kepada seluruh OPD agar dalam menyusun perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan atau proyek besar. "Jangan buat yang tidak efektif, yang tidak beri dampak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," tegasnya.





Ia juga meminta agar program harus merata tidak hanya terfokus di kota tapi wilayah pedalaman juga harus tersentuh pembangunan. Jadi mulai Tahun 2023 ini, pembangunan sudah mulai diarahkan ke kampung.

Untuk itu, OPD lewat Musrenbang harus berkoordinasi dengan distrik untuk memilih program prioritas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebab Musrenbang sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung dan kelurahan, kemudian distrik yang hasilnya sudah dibahas juga dalam Forum Perangkat Daerah dan dimantangkan dalam Musrenbang.

Plt Bupati mengatakan, tidak semua usulan dari kampung dan distrik diakomodir oleh OPD. Karena secara aturan ada kegiatan yang seharusnya bisa

didanai dengan dana desa yang sudah dialokasikan ke semua kampung. "Tapi kampung ini tidak tahu bikin apa. Jadi jangan ada bahasa lagi kalau usulan

tidak diakomodir karena sudah ada dana desa," katanya.

RKPD Tahun 2024 dikatakan Plt Bupati, merupakan tahun terakhir imple-



Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte menandatangani berita acara hasil Musrenbang-da RKPD 2024 pada saat penutupan.



Foto: Bappeda



mentasi visi misi masa kepemimpinannya bersama Eltinus Omaleng. Jadi ia berharap dalam dua tahun baik 2023 dan 2024, OPD bisa maksimal kerja sehingga target Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) bisa tercapai setidaknya 80 persen.

Tiga tahun kepemimpinan ia mengakui pembangunan belum merata, masih fokus di titik tertentu sehingga pusat ekonomi baru belum tercipta. Ditambah lagi OPD masih bekerja tumpang tindih. Ini menjadi hal yang ditegaskan Plt Bupati harus dievaluasi dan tidak boleh terjadi lagi.





Sementara itu Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi menambahkan, tujuan pelaksanaan Musrenbangda adalah untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah. Menyepakati program kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Papua Tengah. Juga untuk menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang provinsi dan nasional.

Adapun prioritas pembangunan di Tahun 2024 diantaranya, peningkatan SDM Mimika yang berdaya saing, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif lewat penerapan smart City, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, percepatan pembangunan sentra-sen-

tra ekonomi di pedalaman dan pesisir dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal, peningkatan daya tarik investasi dengan pemanfaatan potensi pariwisata melalui eksplorasi serta pembangunan pariwisata. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar serta pertumbuhan ekonomi. Penciptaan ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada penutupan, Yohana Paliling melaporkan Musrenbang RKPd Tahun 2024 telah menyepakati 260 program, 2.357 kegiatan dan 2.313 sub kegiatan dengan pagu Rp5.216.060.833.534.

“Ini merupakan hasil rasionalisasi selama tiga hari dengan seluruh OPD, yang sebelumnya telah disampaikan di Ranwal Pembukaan RKPd/Musrenbang, bahwa Renja yang terinput kurang lebih sekitar Rp7 triliun,” katanya. (BAPPEDA)





Kunjungan Komisi IX DPR RI di Mimika



KOMISI IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Tengah pada Jumat (14/4/2023) di Timika. Salah satu agenda yang dilakukan adalah meninjau program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PT Freeport Indonesia di bidang kesehatan yakni Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM). Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena memberi apresiasi kepada seluruh tenaga medis di RSMM yang sudah bekerja



Anggota Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat, fasilitas kesehatan yang didanai oleh PT Freeport Indonesia melalui YPMAK.

Foto: Bappeda



dengan sangat keras membantu pemerintah didukung PT Freeport Indonesia melayani masyarakat 7 suku asli Papua dan masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Mimika. “Rumah sakit ini sejak dulu jadi rujukan bagi masyarakat,” katanya.

Melihat layanan dan komitmen yang sudah berjalan selama puluhan tahun sejak Tahun 1999, Emanuel Melkiades memuji Freeport Indonesia yang sampai saat ini konsisten dengan komitmennya yang tidak hanya menjalankan bisnis tapi juga menjalankan tanggungjawab sosial di bidang kesehatan dengan memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada 7 suku asli Papua.

Menurutnya, ini bisa menjadi model atau contoh bagi perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia. “Saya pernah datang tahun 2005, kami review lima urusan di PT Freeport Indonesia ter-

masuk CSR, salah satunya di sini (RSMM), Tahun 2005 saya ke sini dan sampai saat ini saya datang lagi, rumah sakitnya masih stabil dengan pelayanan hampir sama, jadi puluhan tahun saya saksikan, berarti perjalanan rumah sakit ini ditopang oleh PT Freeport Indonesia dan ini bagus jadi contoh agar ke depan perusahaan yang punya kapasitas, kemampuan selain dia punya induk di bisnis, tapi CSR di kesehatan jadi model,” terangnya.

PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK) yang mengelola dana kemitraan telah menanggung iuran sebanyak 21 ribu masyarakat 7 suku sebagai peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan tetap mendapat pelayanan yang ditanggung oleh Freeport melalui YPMK.

Emanuel juga mengapresiasi Pemkab Mimika yang sudah menjalankan Universal Health Coverage (UHC). Sehingga dengan atau tanpa mendapat support dari Freeport melalui YPMK, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Itu juga kerjasama dengan RSUD Mimika sehingga layanan kesehatan di RSMM apabila membutuhkan rujukan, RSUD ternyata sangat baik berjalan dan ditopang oleh Pemda Mimika yang membayar iuran sehingga bisa dilayani melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Emanuel.

Direksi BPJS Kesehatan, dr Lily menambahkan di RSMM, selain dijamin melalui JKN yang dibayarkan oleh Freeport, masyarakat tetap mendapat pelayanan yang dijamin oleh Freeport melalui YPMK. (BAPPEDA)





RS Waa Banti Siap Dioperasikan

AKSI teror dari kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu lalu di wilayah Kampung Banti dan Kampung Optiwak, Distrik Tembagapura menyebabkan kerugian material. Tidak hanya rumah milik masyarakat, fasilitas umum seperti sekolah hingga rumah sakit jadi sasaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berupaya melakukan pemulihan kembali. Salah satu fasilitas yang kini telah diselesaikan adalah RS Banti. Rumah sakit tipe D ini dibangun Tahun Anggaran 2022 lalu atas perjuangan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH



● **RS Waa Banti yang berada di Kampung Banti, Distrik Tembagapura.**



Foto: Bappeda



yang melobi Kementerian Kesehatan. Hingga akhirnya disetujui dan Pemkab Mimika mendapat alokasi anggaran.

Kini, RS yang dibangun dua lantai itu telah rampung dibangun dan siap dioptimalkan. Alat kesehatan dan peralatan lainnya dimobilisasi secara bertahap. Tenaga yang akan ditempatkan juga mulai dipersiapkan. Dinas Kesehatan Mimika dibantu oleh RSUD Mimika dan RS Tembagapura. "Jadi kami coba operasikan step by step," kata Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra.

RS Waa Banti sekarang sudah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Semua tenaga dan peralatan juga disiapkan oleh pemerintah. Tapi karena RS yang berada dekat dan hanya bisa diakses melalui jalur perusahaan maka untuk operasional akan kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAM).



Layaknya sebuah rumah sakit, RS Waa Banti akan melayani layanan gawat darurat. Kemudian lima poli yaitu poli rawat jalan, poli ibu, poli anak, poli pe-

nyakit menular dan poli gigi. Ditambah layanan esensial lain seperti farmasi laboratorium, ruang operasi dan ruang untuk direktorat. (BAPPEDA)



RS Waa Banti yang berada di Kampung Banti, Distrik Tembagapura.

Foto: Bappeda

Mimika Dapat Jatah 6 Kursi MRP Papua Tengah

LEMBAGA Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah segera terbentuk. Panitia seleksi tengah melakukan penjurangan calon anggota dari delapan kabupaten. Kabupaten Mimika mendapat jatah 6 kursi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mimika, Yan Selamat Purba ditemui Rabu (26/4/2023) mengungkapkan sosialisasi kepada lembaga adat di Mimika sudah dilakukan. Mekanisme atau proses perekrutan anggota MRP kata dia telah berbeda dan dikembalikan ke lembaga adat untuk merekomendasikan utusannya.

Sementara panitia seleksi yang dibentuk di kabupaten kata dia, hanya sekadar memfasilitasi untuk proses seleksi administrasi. "Jika memenuhi syarat akan dikirim ke provinsi untuk ditetapkan," ujar Yan Purba.

Selanjutnya tahapan akan ditangani oleh Pansel tingkat provinsi yang sudah dilantik oleh Pj Gubernur Papua Tengah. Pansel itu terdiri dari unsur pemerintah dan perwakilan masyarakat. "Ditargetkan Juni sudah dilantik MRP Provinsi Papua Tengah," tandasnya.

Kabupaten Mimika mendapat jatah 6 kursi. Terdiri dari dua perwakilan adat, dua perwakilan perempuan dan dua perwakilan tokoh agama atau gereja. Di Mimika dua lembaga yang berhak memberi rekomendasi adalah lembaga adat Suku Amungme dan Kamoro. Namun tidak menutup kemungkinan jika, dua lembaga adat ini merangkul lima suku kekerabatan lainnya.

Persoalannya, dua lembaga adat yang menaungi dua suku asli Mimika yaitu Lemasa untuk Amungme dan Lemasko

untuk Kamoro mengalami dualisme kepemimpinan. Persoalan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun namun tak juga diselesaikan dan masing-masing kepemimpinan mengklaim diri sebagai pengurus sah.

Pemkab Mimika ditegaskan Yan Purba, sudah berulang kali meminta para pihak agar bisa bersatu demi kepentingan masyarakat adat. "Lembaga adat yang dualisme, ini kesempatan mereka untuk bersatu kembali. Barang ini sudah dua tahun lalu kita imbau supaya rekonsiliasi. Saya sudah bilang, tadi yang dualisme itu segera bersatu, kumpul untuk usul nama terbaik yang direkomendasikan. Karena ini bukan menyangkut kepentingan kelompok satu dua orang tapi ini menyangkut suku yaitu suku Amungme dan Kamoro," jelasnya. **(BAPPEDA)**



Foto: Ilustrasi

Pemkab Mimika Hibahkan Anggaran Untuk Renovasi Masjid Babussalam

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Mimika menghibahkan anggaran senilai Rp 5 miliar dalam APBD Tahun 2023 untuk renovasi bangunan Masjid Babussalam.

Bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah ini sudah direncanakan dari tahun lalu. Dimana, pemerintah menginginkan ada satu ikon dari umat Islam yakni melalui bangunan masjid.

Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Babussalam tahun lalu secara langsung meminta pemerintah melalui Plt Bupati untuk memberikan

bantuan merenovasi bangunan masjid ini.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM, pada tahun lalu yang meletakkan batu pertama penanda aktivitas renovasi bangunan masjid. "Se-suai dengan proposal yang mereka ajukan (DKM Babussalam) kami bantu sementara Rp 5 miliar untuk rehab Masjid Babussalam" ujar Jhon Rettob, Jumat (14/4/2023).

Setelah diberikan dana hibah, pembangunan akan dilakukan sendiri oleh pengurus DKM. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban akan diserahkan kepada pemerintah.

Bantuan hibah tahun ini kata Jhon Rettob juga diberikan ke beberapa rumah ibadah baik gereja maupun masjid yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik. Bantuan hibah yang sama juga diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan. (BAPPEDA)



Masjid Agung Babussalam yang sedang dalam proses rehabilitasi.

Foto: Bappeda

Pemkab Komitmen Sukseskan Pemilu 2024

PEMERINTAH Kabupaten Mimika memastikan akan mengalokasikan dana hibah dalam rangka suksesi pemilihan umum (Pemilu). Bahkan bukan hanya ke KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, Pemkab Mimika juga bakal mengalokasikan dana pengamanan ke TNI dan Polri.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte yang ditemui Rabu (26/4/2023) mengatakan Pemkab Mimika sudah menerima proposal kebutuhan anggaran dari KPU dan Bawaslu. Pertemuan akan dilakukan untuk rasionalisasi anggaran. "Itu sudah amanat jadi Pemda pasti akan siapkan pembiayaan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi,"

tandasnya.

Petrus Yumte mengaku belum melihat proposal serta nilai anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu. Tapi proposal sudah disampaikan ke Bappeda dan akan dilakukan rasionalisasi. TNI dan Polri juga akan mendapat dana hibah tersendiri namun tetap dalam rangka pengamanan Pemilu. "Kami mau lihat proposal mereka dulu, bahas bersama ada hal-hal wajib mana yang Pemda harus support," katanya.

Alokasi dana hibah ini akan diakomodir dalam APBD Perubahan karena memang belum termuat dalam APBD induk Tahun 2023. Dana hibah juga tidak dialokasikan sekaligus tapi

bertahap dengan pembagian 40 persen di Tahun 2023 dan 60 persen di Tahun 2024 mendatang.

"Di APBD induk belum ada, tapi bukan soal ada atau belum ada, kita mengikuti tahapannya. Tahapan mulai Oktober baru tahapan mulai, mungkin di perubahan 2023 kita akomodir 40 persen, sisanya di Tahun 2024 yang 60 persen," jelas Petrus Yumte.

Tidak hanya dalam bentuk dana, Pemkab Mimika sebenarnya sudah membangun kantor KPU namun belum rampung. Pj Sekda sudah menginstruksikan Kesbangpol agar segera proses lelang sehingga kantor bisa diselesaikan sebelum tahapan Pemilu semakin padat. **(BAPPEDA)**



Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte

Foto: Bappeda

Pemkab Mimika Bangun Kantor Polsek KP3 Udara Bandara Mozes Kilangin

POLRES Mimika tengah membangun kantor Polsek KP3 Udara Bandara Mozes Kilangin. Dalam proses pembangunannya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Umum Setda Mimika.

Kepala Bagian Umum Setda Mimika, Herry Onawame mengungkapkan pembangunan sudah memasuki tahap kedua. Tahun 2022, pembangunan tahap pertama dimulai dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar. Secara fisik sudah sampai pada tahap pembangunan struktur dan pema-

sangan atap.

Tahun ini, pembangunan kantor yang berada di depan pintu masuk Bandara Moses Kilangin itu kembali mendapat alokasi anggaran dari Pemkab Mimika sebesar Rp 4,9 miliar. Herry menyatakan, dengan anggaran itu gedung yang menggunakan struktur baja itu bisa diselesaikan dan dihibahkan kepada Polres Mimika.

Hibah pembangunan kantor Polsek KP3 Udara ini diungkapkan Herry, berdasarkan pengajuan proposal dari pihak Kepolisian kepada Bupati Mi-

mika. Atas pertimbangan kebutuhan yang mendesak dalam rangka menunjang pengamanan maka Bupati menyetujui dan dilakukan pembangunan mulai Tahun 2022 lalu.

Dengan anggaran sebesar itu, pembangunan bisa diselesaikan tahun ini hingga selesai. Namun tidak termasuk meubelair. "Tahun ini kami rencana untuk finishing. Mudah-mudahan dengan anggaran yang tersedia, bisa diselesaikan, tapi itu hanya gedung dan kita serah terima kunci," ujar Herry. (BAPPEDA)



Kantor Polsek KP3 Udara Bandara Mozes Kilangin yang sedang dalam proses pembangunan.

Foto: Bappeda



Mobil penyapu jalan dioperasikan untuk membersihkan ruas jalan utama salah satunya Jalan Cenderawasih



Foto: Bappeda



Penerapan arus lalu lintas dua arah kembali diberlakukan di sebagian Jalan Budi Utomo



Foto: Bappeda

Sosialisasi Penyusunan LPPD

BAGIAN Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika kembali menggelar Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Kegiatan yang digelar Kamis (13/4/2023) di Hotel Cenderawasih 66 itu dibuka oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM.

Turut hadir sebagai narasumber, Kasubid Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah III Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra Imelda, MAP, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika,

Hengky Amisim, pimpinan OPD dan tamu undangan.

Kasubid Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah III Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra Imelda, MAP memaparkan catatan LPPD Mimika Tahun 2022 yang sudah diserahkan kepada Kemendagri.

Imelda mengungkapkan, masih banyak catatan yang harus diperbaiki oleh Pemkab Mimika terutama pada program urusan wajib. Seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketertiban umum hing-



Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM

ga sosial.

Mendengar hal itu, Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya mengaku kecewa dengan kinerja perangkat daerah yang tidak mampu



Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM bersama narasumber dari Kemendagri membuka kegiatan sosialisasi.

Foto: Bappeda

menyajikan data yang akurat dan lengkap. Sehingga terkesan Pemda Mimika tidak mengerjakan apapun dan laporannya selalu merah.

Plt Bupati menyebut, OPD masih menyepelekan LPPD padahal ini menjadi penilaian kinerja kepala daerah. Ketika penyusunan LPPD, Bagian Tata Pemerintahan sangat kesulitan mendapat data dari OPD teknis. “Kalau minta program datang, tapi begitu minta data, tidak ada yang kasih datanya,” ujar Plt Bupati.

Untuk itu ia meminta seluruh OPD merubah mindset atau cara berpikir. Sebab Mimika mengelola anggaran yang tidak sedikit. Tahun 2022 lalu saja, APBD mencapai Rp 5,1 triliun yang mencatatkan Mimika sebagai daerah nomor lima APBD terbesar di Indonesia. “Saya tidak paham apa yang OPD lakukan. Padahal kita buat Musrenbang, susun RKPD, Renja tapi begitu LPPD



Foto: Bappeda

nol, jadi kita dianggap tidak kerja apa-apa,” katanya.

Terutama pada urusan yang wajib seperti pendidikan dengan mandatory anggaran 25 persen dari APBD. Tapi dalam laporan yang disampaikan dalam LPPD nihil atau masih merah. Begitu juga dengan OPD lainnya yang wajib menjalankan program SPM.

Dengan adanya sosialisasi yang dihadiri langsung tim dari Kemendagri, Plt Bupati meminta seluruh OPD tidak lagi bermain-main. Data harus lengkap sebagai dasar pengambilan kebijakan atau penyusunan program. “Mimika kelihatan tidak buat apa-apa karena data dan laporan tidak lengkap,” tandas Plt Bupati. **(BAPPEDA)**



Perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah di Mimika

MERAYAKAN hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh, umat Islam di Mimika melakukan pawai takbir keliling pada Jumat (21/4/2023) dipusatkan di pelataran Graha Eme Neme Yauware.

Pawai takbir yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika ini juga diisi dengan lomba mobil hias yang diikuti 38 masjid, paguyuban dan organisasi kemasyarakatan di Mimika.

Tidak hanya mobil hias, sebagai bentuk kegembiraan, ribuan umat Islam juga turut serta dalam pawai takbir menggunakan kendaraan. Kemeriahan ini seketika membuat Kota Timika menjadi macet karena warga tumpah ruah ke jalan merayakan hari kemen-

angan.

Peserta dilepas oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM didampingi Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, tokoh agama dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika, Ignatius Adii.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob pada kesempatan itu memberi ucapan selamat kepada seluruh umat Islam di Mimika yang merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. "Sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan dan pada malam ini sambut Idul Fitri dengan takbiran keliling," katanya.

John Rettob berharap pawai ini bukan sekadar seremonial dan ikut meramaikan semata tapi bisa menambah keimanan

umat Islam dan menjadi momen untuk merubah perilaku ke arah lebih baik

Sebagai bentuk dukungan kepada umat Islam, Pemkab Mimika akan mencari lokasi yang lebih luas sebagai tempat pelaksanaan Salat Idul Fitri.

Sementara itu Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra mengungkapkan situasi di Mimika saat ini sangat kondusif. Kepolisian telah melakukan apel pengamanan Idul Fitri dan ada 300 personel yang disiagakan di sejumlah tempat.

Termasuk dalam mengawal pawai takbir yang melalui rute jalan dalam Kota Timika mulai dari Graha Eme Neme Yauware - Jalan Budi Utomo - Jalan Hasanuddin - Jalan Yos Sudarso - Jalan Belibis dan kembali ke halaman Graha Eme Neme Yauware.



Foto: Bappeda



Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM melepas peserta pawai takbir.

Foto: Bappeda

Plt Bupati Hadiri Salat Id

Salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang jatuh pada Sabtu (22/4/2023) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dilaksanakan di 77 titik salah satunya di halaman Graha Eme Neme Yauware.

Halaman Graha ENY menjadi salah

satu lokasi yang dipadati umat untuk melaksanakan salat berjamaah. Diperkirakan ada ribuan orang yang hadir. Pasalnya halaman dalam area gedung tidak mampu menampung, sehingga sebagian jamaah terpaksa mengikuti salat dari luar pagar tepatnya di jalan raya.

Salat dipimpin oleh Ust H Muslimin, SAg selaku imam dan Ust H M Amin Ar, SAg SPd MM sebagai khotib. Ada-

pun Salat Id terdiri dari dua rangkaian yaitu salat dua rakaat dan khotbah. Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM juga tampak hadir sebelum Salat Id dimulai.

Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra juga turun langsung memantau proses pengamanan. Tidak hanya dari TNI dan Polri, pemuda lintas agama di Mimika juga turut mengamankan Salat Id.



Foto: Bappeda

Ust Amin dalam khotbahnya mengatakan berakhirnya ramadan menandakan datangnya bulan Syawal sebagai tanda kemenangan. Ibarat menyambut pejuang dari medan perang yang membawa kemenangan disambut dengan sukacita. Demikian pula umat Islam menyambut Idul Fitri dengan sukacita.

Ust Amin menguraikan ada tiga bentuk kemenangan yang diraih umat Islam selama ramadan. Pertama, kemenangan spritual yaitu kemenangan jiwa yang selalu bersih dan suci dari berbagai noda dan penyakit syirik, sombong dan dengki. "Sungguh telah menang dan beruntung orang yang sucikan jiwa dan raganya," katanya.

Jiwa yang menang lanjutnya, adalah jiwa yang berupaya bentengi diri dari berbagai penyimpangan terhadap aturan yang ditetapkan Allah SWT. Ini menjadi hakikat taqwa sesungguhnya yang ingin dicapai.

"Apabila sifat taqwa sudah tumbuh subur maka

dia rela senang hati dan menerima aturan Rasul apapun konsekuensinya meskipun korbanan sesuatu yg dicintai atas nama cinta kepada Allah dan Rasul. Jika berhasil maka ia merayakan puncak kemenangan spiritual," terang Ust Amin.

Kemenangan kedua adalah kemenangan emosional. Ibadah ramadan membimbing umat Islam menuju kemenangan emosional. Itu dapat diraih jika mampu mengendalikan emosi. Sabar dalam Islam bukan kelemahan tapi menjadi kekuatan.

Ketiga, kemenangan intelektual. Ramadan melahirkan pribadi muslim yang menang secara intelektual. Ditandai dengan kecerdasan memahami realita yang memberi keseimbangan pada dirinya ditandai dengan selalu bisa bedakan halal dan haram. Bisa pertimbangan manfaat dan mudarat serta mengerti hak dan kewajiban.(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Plt Bupati Lantik PHBI Mimika

PELAKSANA Tugas Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM melantik Badan Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika periode 2023-2025 berdasarkan SK Bupati Mimika Nomor 38 tahun 2023, Jumat (14/4/2023) di Gedung Serbaguna Babussalam.

Pengurus PHBI periode untuk dua tahun ke depan kembali dipimpin oleh La Itam Gredenggo, SIP MSi yang pada periode sebelumnya juga mengemban amanah sebagai ketua. Pelantikan ditandai dengan pembacaan sumpah janji dan penandatanganan SK pelantikan.

Plt Bupati Jhon Rettob mengatakab pelantikan ini menjadi tanda

sahnya kepengurusan PHBI. Ia berharap agar dalam bekerja, merencanakan suatu acara hari-hari besar Islam bisa berkoordinasi dengan baik.

Pada kepengurusan PHBI ini kata dia ada untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan hari besar Islam. "PHBI ini ada untuk membantu pemerintah dalam kegiatan besar Islam, saya harap saling koordinasi dalam menjalankan tugas," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Jhon Rettob juga berpesan agar penceramah yang didatangkan dari luar kota tidak mempengaruhi kebersamaan, solidaritas, toleransi yang sudah berjalan dengan baik. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Umat Nasrani di Mimika Rayakan Paskah dengan Pawai Obor

SEBAGAI puncak dari perayaan Paskah, umat nasrani di Mimika dari berbagai denominasi gereja merayakan Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus dengan melakukan pawai obor. Ada yang mengikuti pawai obor terpusat yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja Mimika (PGGM) namun, masing-masing jemaat juga melakukan hal yang sama.

Pawai obor yang digelar pada Minggu (9/4/2023) dini hari itu diramaikan ribuan umat dengan melakukan pawai melalui jalan-jalan utama di Kota Timika. Mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga dewasa turut serta merayakan Paskah bersama.

Perayaan Paskah bersama di Mimika mengusung tema yang dirumuskan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang terambil dari Matius 28:7,10 "Ia Mendahului Kamu ke Galilea; Jangan Takut!"

Ketua PGGM Mimika, Pdt Donald Salima, STh SE yang juga Ketua Ma-

jelis Pertimbangan Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua mengatakan Paskah tahun ini merupakan yang perdana setelah masa pandemi global yang relatif telah berakhir.

"Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang oleh karena kemurahan-Nya telah menolong kita melewati masa mencekam tersebut. Kita juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pemerintah, pekerja medis dan para medis, relawan, organisasi-organisasi nonpemerintah, maupun warga masyarakat," terangnya.

Tema paskah tahun ini diusung oleh PGI dikatakan Pdt Donlad, melihat situasi sekarang dimana kehidupan manusia belum sungguh-sungguh terlepas dari banyak masalah krusial. Setelah berlalunya pandemi Covid-19, dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan

akan menghantam lebih banyak negara, gempa dahsyat di Turki, dan mulai memanasnya suhu politik di Tanah Air menjelang Pilpres dan Pilkada serempak pada 2024 yang berpotensi memunculkan benturan bermotif SARA.

"Nas di atas berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid, kini bangkit, hadir serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka ke Galilea," jelas Pdt Donlad.

Oleh karena itu, di masa Paskah 2023 ini, Pdt Donlad mengajak umat mengizinkan Kristus hadir dan mendahului dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus telah memberikan panduan yang jelas bagi manusia untuk menemukan orientasi baru, menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguak ruang bagi yang lain, berjuang bersama yang lain. (BAPPEDA)



Ribuan umat mengikuti pawai obor Paskah yang digelar

Foto: Bappeda

Plt Bupati Hadiri Perayaan Dharma Shanti Nyepi

MASIH dalam rangkaian hari Nyepi Tahun Baru Saka 1945, umat Hindu yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Mimika merayakan Dharma Shanti Nyepi pada Jumat (29/4/2023)

di Hotel Cartenz Timika.

Perayaan ini dihadiri Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof Dr. Drs I Nengah Duija, MSi, Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, SSos MSi, Ketua PHDI Provinsi Papua Tengah, I Dewa Gede Su-

kawati, SPd, para tokoh lintas agama, ketua paguyuban serta umat Hindu.

Ketua Panitia Dharma Shanti Nyepi 1945, AKP I Wayan Nurida mengatakan ini merupakan puncak dari perayaan Nyepi yang dilaksanakan PHDI Mimika.



Foto: Bappeda



Sebelumnya sudah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti bakti sosial dan juga rangkaian peribadatan.

Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof Dr Drs I Nengah Duija, MSi mengajak umat

Hindu di Mimika memaknai Nyepi, bukan ritual belaka tetapi bagian dari perjalanan manusia menuju cita-cita akhir.

Nyepi dijelaskannya, sebagai cara untuk memaknai kebesaran Tuhan yang memegang



jiwa manusia. “Yang namanya jiwa manusia, siapa yang pegang. Tidak bisa dipegang oleh manusia, yang pegang adalah Tuhan. Siang-malam, pagi-sore Tuhan tidak pernah berhenti memegang jiwa kita,” jelasnya.

Untuk itu sebagai manusia yang dipegang jiwanya oleh Tuhan yang maha kuasa, maka manusia harus memuja kekuatan yang bisa memegang jiwa kita.

Kepada umat Hindu di Timika, I Nengah meminta agar tidak mem-Bali-kan Timika tetapi harus menjadi Hindu Timi-

ka. “Saya sangat berharap, umat Hindu bisa terus berkontribusi memajukan Timika,” ujarnya.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta agar kebersamaan antar umat beragama di Mimika. Sebagaimana agama Hindu yang mengajarkan ‘aku adalah engkau’. Ini adalah sebuah ajaran untuk menjalin toleransi.

Toleransi antar umat beragama di Mimika dikatakan Plt Bupati, sangat baik. Suasana ini harus diciptakan dan dirawat terus menerus. “Kita harus saling mendukung, Mimika banyak aga-

ma, suku dan perbesaan tapi Mimika harus dijadikan rumah bersama,” katanya.

Pemkab Mimika lanjutnya, terus berusaha memberikan perhatian kepada semua agama. Juga terbuka menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan baik tingkat provinsi bahkan nasional. “Saya punya mimpi besar bagaimana Mimika jadi daerah toleransi nasional,” ucapnya.

Perayaan Dharma Shanti Nyepi ini juga diisi dengan tarian Papua dan tarian Bali.(BAPPEDA)

DA SHANTI BARU SAKA 1945 TEN MIMIKA 3 APRIL 2023

EMA

DA DAN DHA NEGARA

DEMOKRA NIE

MA
NDON

AU

Mimika Menuju Eliminasi TBC Tahun 2030

SETIAP tanggal 24 Maret, diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Di Kabupaten Mimika, peringatan Hari TB Sedunia baru digelar Selasa (11/4/2023) dengan mengusung tema 'Ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa!'

Peringatan Hari TB dihadiri oleh Pj Sek-

da Mimika, Dr Petrus Yumte, SH MSi, Forkopimda, para kepala puskesmas, juru TB, serta lembaga mitra seperti PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pengembangan Kesehatan dan Masyarakat Papua (YPK-MP) yang aktif dalam pengendalian dan pencegahan TB di Mimika.



Foto bersama Pj Sekda Mimika, Dr Petrus Yumte, SH MSi saat peringatan Hari TB Sedunia di Kabupaten Mimika.

Foto: Bappeda

Kabupaten Mimika kata Pj Sekda, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah dengan beban TBC yang tertinggi. Ini mengindikasikan bahwa penyakit TBC memang telah berkembang di masyarakat. Di sisi lain, situasi ini memberi gambaran bahwa fasilitas kesehatan pemerintah dan stakeholder telah mempunyai kemampuan untuk mendeteksi TBC, sehingga angka temuan berada diatas dari yang

ditargetkan oleh Provinsi Papua Tengah.

Namun demikian ditegaskan Pj Sekda tantangan dalam pengendalian tuberkulosis bukan hanya menemukan tapi bagaimana mengobati semua penderita TBC sampai sembuh, agar semua penderita TBC di Mimika dapat kembali sehat, hidup berkualitas dan produktif.

Ia mengungkapkan angka keberhasilan pengobatan kita baru mencapai 76



persen dan belum mencapai angka yang diharapkan yakni 90 persen. Angka putus pengobatan juga masih tinggi, ini menunjukkan bahwa program penanggulangan TBC di Mimika masih perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Untuk itu momentum peringatan Hari TB Sedunia ini, Pj Sekda berharap benar-benar akan mendorong dan meningkatkan peran serta dan dukungan masyarakat dalam program penanggulangan TBC. Salah satunya dengan cara menyebarkan informasi seputar TBC, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan serta komitmen yang kuat dari fasilitas kesehatan untuk dapat melakukan pemeriksaan semua masyarakat yang memiliki tanda gejala TBC dan mengobatinya sampai sembuh serta tidak lupa memberikan

pengobatan pencegahan TBC agar TBC ini benar-benar bisa diakhiri di Mimika.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Mimika, Kamaluddin, Skep Ners mengungkapkan hampir semua jenis TBC ditemukan di Mimika. Baik itu TB sensitif obat, TB resisten obat, TB tulang hingga TB kelenjar.

Indonesia menargetkan eliminasi TB pada Tahun 2030 mendatang dengan target kasus hanya 65 per 100.000 penduduk. Sementara angka TB sekarang secara nasional masih 312 per 100.000 penduduk. Mimika bahkan dua kali lebih tinggi yakni 707 per 100.000 penduduk. Angka kematian TBC juga masih 27 per 100.000 penduduk.

Kamal mengatakan ini merupakan pekerjaan berat. Berbagai upaya dilakukan salah satunya skrining. Tahun 2021 lalu, Dinkes Mimika diberi



Foto bersama Pj Sekda Mimika, Dr Petrus Yumte, SH MSI saat peringatan Hari TB Sedunia di Kabupaten Mimika.

Foto: Bappeda



target 8.100 tapi bisa mencapai hingga 100.000 orang yang bisa diperiksa. "Target kami, semua yang memiliki tanda gejala positif harus diobati sampai sembuh," katanya.

Hingga Tahun 2022, sebanyak 2.235

pasien TBC sudah diobati. Meskipun yang tuntas minum obat baru 85 persen. Namun, untuk pasien TB resisten obat tidak ada yang putus minum obat. Semua yang kontak dengan pasien TB juga diperiksa dan diberi obat pence-

gahan.

Tahun 2023 ini, Dinkes Mimika menargetkan pemeriksaan orang terduga TB sebanyak 11.697 orang. Juga menargetkan penemuan kasus TB baru sebanyak 2.014. (BAPPEDA)



Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Pasien TB

JAKOBA Somnaikubun, AMK atau Jakrab disapa Suster Koce oleh rekan sejawatnya. Nama yang tidak asing bagi para penderita TBC. Bagaimana tidak, suster berdarah Maluku ini telah mengabdikan diri selama puluhan tahun menangani TBC.

Sebelum Kabupaten Mimika menjadi daerah otonom baru, ketika masih berada di bawah Kabupaten Fakfak, Suster Koce sudah mulai bertugas di Puskesmas Timika tepatnya Tahun 1996. Kemudian Tahun 1998, ia mendapat nota tugas bekerjasama dengan malaria kontrol. Lembaga yang dibentuk PT Freeport Indonesia untuk menangani malaria dan juga TBC. Tapi karena ada pemekaran kabupaten sehingga ia kembali ke Fakfak untuk mengurus kepindahannya menjadi PNS di Kabupaten Mimika.

Tepatnya Tahun 2001, ia kembali ke Timika untuk melanjutkan pengabdianya. Kala itu belum ada program khusus untuk TBC di Puskesmas. Masih ditangani malaria kontrol PT Freeport Indonesia. Perawat di Puskesmas Timika jumlahnya tidak sampai 10 orang. Mereka saling membantu jika ada kasus yang membutuhkan penanganan.

Suster Koce bergabung dengan tim malaria kontrol yang menangani malaria dan TBC. Fasilitas kesehatan juga masih terbatas. RSUD Mimika juga belum. Wilayah kerjanya untuk menangani TBC cukup luas. Dari Kilometer 10 sampai wilayah satuan pemukiman (SP). Jika ada pasien yang harus dirawat berarti dirujuk ke Klinik Mile 38 bahkan Tembagapura.

Tahun 2005, TB DOTS dibentuk oleh pemerintah dan Puskesmas mulai direkrut agar pelayanan terarah. Suster Koce menjadi salah satu perawat yang

ditugaskan untuk menangani TB. Ia menceritakan bagaimana penanganan TB kala itu. Awalnya program masih berjalan sendiri tapi kemudian saling kolaborasi dan terpadu. Terutama dengan HIV. Jika pasien suspek TB maka harus periksa HIV.

Dulu, pasien TB belum diberi obat sebelum dikunjungi ke rumah. Itupun tidak mudah karena pasien banyak yang menutup diri karena malu ke tetangga. Bahkan terhadap keluarganya sendiri pasien kadang malu. Ini jadi tantangan bagi petugas kesehatan.

Agar pasien kooperatif, Suster Koce bersama rekannya tidak memakai seragam perawat. Itu untuk menghindari stigma. Jika pakai baju putih pasti ditolak. Bahkan, sosok Suster Koce yang sudah banyak dikenali masyarakat sebagai petugas TBC, kerap diminta untuk tidak turun. "Ada pasien yang minta saya supaya jangan turun. Suster Koce jangan turun karena di lorong itu banyak yang tahu," ucapnya.

Beragam cara dilakukan agar pasien bisa membuka diri. Tak jarang, Suster Koce harus marah. Itu dilakukan demi kesembuhan pasien. Sebagai petugas yang tidak berharap hal lain. Hanya demi pasien sembuh. Berat badan naik satu kilogram saja sudah membuat perawat senang. "Kami lihat kamu (pasien) gemuk saja itu sesuatu yang mungkin kamu rasa biasa-biasa saja tapi kami bangga karena kami punya pasien sudah sembuh,"ujarnya penuh haru.

Membangun kedekatan dengan pasien juga menjadi hal utama. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari, sembari dibelai dilakukan petugas terhadap pasien. Ini membuat pasien dengan petugas tidak ada jarak. Pasien juga sering curhat ke petugas karena takut

mendapat stigma di lingkungan keluarga bahkan takut diusir.

Tidak hanya di lingkungan keluarga, ketakutan terbesar pasien juga adalah kehilangan pekerjaan. Tapi Suster Koce dan timnya terus memberi semangat dan motivasi. Toh, pasien hanya perlu izin dua minggu atau 14 hari untuk pengobatan awal. Ketika gejala perlahan hilang, pasien bisa kembali aktif bekerja seperti biasa asalkan tetap memakai masker. Upaya ini ternyata ampuh. Pasien sembuh dan akhirnya bisa kembali bekerja. Jadi pasien TB tetap bisa



produktif.

Penanganan TB sekarang sudah mulai ada perubahan. Terutama dari dosis obat yang dikonsumsi. Dulu diungkapkan Suster Koce, seorang pasien harus konsumsi minimal 13 butir obat sekali minum. Tapi sekarang setelah ikut TB DOTS, obat langsung di-packing dan disesuaikan dengan berat badan pasien. Paling tinggi 5 butir sekali minum.

Ada banyak tipe pasien yang dihadapi. Dengan latar belakang berbeda. Kadang ada yang datang berobat, ketika ingin pulang tak punya uang untuk ongkos transportasi. Untungnya, Poli TB adalah layanan yang sama sekali tidak berbayar. Jangankan meminta bayaran, melihat kondisi fisik pasien saja sudah membuat petugas iba. Itulah yang membuat petugas TB juga harus berkorban bahkan secara material.

Puluhan tahun mengabdikan diri ber-

sentuhan dengan TBC, Suster Koce tak ingin ada jarak dengan pasien. Hampir setiap hari berhadapan dengan pasien, ia bersyukur tidak terpapar TBC. Malah berat badannya naik. Itulah sebabnya ia selalu menjaga daya tahan tubuh.

Tahun 2024, sosok suster senior di Mimika ini akan memasuki masa purna tugas atau pensiun. Tapi ia tak lagi khawatir, karena beberapa rekan sejawatnya juga mulai memberi diri untuk menangani TB. Walaupun tak jarang juga ada perawat yang tak ingin bersentuhan dengan penyakit menular itu.

Kepada rekan sejawatnya, Suster Koce berharap agar tidak perlu takut berdekatan dengan pasien TB. Justru sebagai pelayan harus bisa merangkul. Tetap menjaga daya tahan tubuh agar tidak terpapar. "Yang utama tergantung dari hati. Kita mau melayani dan ragu. Kalau melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, berarti Tuhan tahu kita punya

hati. Pesan untuk teman-teman saya, takut Tuhan terlebih dahulu. Andalkan Tuhan baru kita pelayanan maka semua itu setiap rencana orang jahat dalam pelayanan Tuhan sendiri yang berperkara," tuturnya.

Ia memang sosok yang tidak takut. Bahkan pernah dikejar dengan kampak. Tapi karena melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan hati maka semuanya dapat dilalui. "Saya pesan kepada teman-teman takut Tuhan dalam melakukan pelayanan maka semua pasien TB akan sembuh," pesannya.

Suster Koce sebenarnya pernah ditawarkan untuk pindah dari TB dan menangani program lain. Bahkan ditawarkan menjadi wasor TB, tapi kecintaan dan kepeduliannya terhadap pasien TB justru membuatnya tetap enjoy menjadi seorang petugas lapangan. "Saya tetap dengan TB, tidak kemana-mana," tutupnya. (ryu)



Jakoba Somnaikubun, AMK menerima piagam penghargaan dari Pj Sekda Mimika, Dr Petrus Yumte, SHMSi dalam momen peringatan Hari TBC Sedunia.

Foto: Bappeda

Plt Bupati Pantau Stok Daging

MENJELANG Idul Fitri 1444 Hijriah, pasokan daging ayam dan daging sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Sebanyak 615 ton daging ayam dan daging sapi, masing-masing daging ayam 600 ton

dan 15 ton daging sapi dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu daging ayam maupun daging sapi memiliki kualitas yang baik dan sehat. Hal ini diungkapkan Kepala

la Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan) drh Sa-belina Fitriani, MSi usai melakukan sidak di Pasar Sentral dan penjual daging di Jalan Hasanuddin, Rabu (12/4/2023).





Plt Bupati Mimika, John Rettob mengharapkan pasokan daging cukup menjelang lebaran, kualitas daging baik dan harganya tidak mengalami kenaikan. "Saya harap semua baik sehingga konsumsi masyarakat pada lebaran nanti tidak ada masalah," jelasnya.

Setelah mengikuti langsung sidak ini, Jhon Rettob juga memastikan jika pasokan daging cukup untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Disnak sendiri sudah memastikan pasokan daging yang ada di pasaran berkualitas. "Saya juga ikut langsung guna melihat langsung kesiapan dari penjual daging, supaya masyarakat di Mimika aman,

tidak ada kebaikan harga yang sangat fluktuatif ataupun sangat fantastis," ungkapnya.

Senada dengan hal itu, drh Sabelina Fitriani menyebut sidak dilakukan untuk melihat produk ternak khususnya kualitas daging dan ayam karena terkadang masyarakat dan penjual tidak melihat serta menjual yang tidak layak.

"Kita khawatirkan kualitas daging tidak terpenuhi, untuk itu kami melakukan sidak ini. Dengan sidak, pemerintah berharap pada saat hari raya Idul Fitri daging maupun ayam yang dijual itu berkualitas," jelas Sabelina.

Soal kualitas daging yang baik, Sabelina juga mengatakan jika masyarakat saat ini sudah mulai tereduksi untuk memilih produk yang terbaik.

Pihaknya juga secara berkala pada pedagang ini, pengecer di pasar dan kios-kios penjual daging diberikan pembinaan selama dua bulan sekali. Pemerintah memberikan sosialisasi agar mereka menjual produk ternak yang berkualitas baik.

"Kita sampaikan juga ciri-ciri, masyarakat juga akan sering kita himbau bagaimana cara memilih daging yang baik karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan keluarga," jelasnya.

Sidak sendiri dilakukan di tiga titik dengan tiga tim Disnak dan Keswan. Sidak dilakukan di lapak dalam pasar, deretan kios daging Jalan Hasanuddin, toko Rasya (sebelah Pom bensin Jalan Hasanuddin), titik ke dua di Swalayan Gelael signature, Diana supermarket, kios daging sebelah Senyum 5000, kios Alif Jalan Belibis dan titik ke tiga di Eks Pasar Swadaya, kios Fresh Jalan Bougenville, toko Dandi putra I Jalan Ki Hajar Dewantara dan Toko Dandi putra II Jalan Pendidikan.

Adapun produk yang disita yakni daging ayam sebanyak 3 kilogram disita dari tiga lapak penjual ayam beku di Pasar Sentral. Disita karena kondisi daging hitam dan kuning terkena noda plastik pembungkus sehingga tidak layak dikonsumsi.

Walaupun masih menemukan adanya daging ayam yang tidak layak konsumsi, namun dari keseluruhannya hasil sidak sudah baik dan pasokan daging cukup memenuhi kebutuhan umat Islam.

"Daging sapi, ayam dan olahannya semuanya baik dan layak dikonsumsi, stok daging ayam dan daging sapi mencukupi untuk kebutuhan menjelang Idul Fitri," ungkap Sabelina.

Untuk diketahui, stok daging cukup dengan total 600 ton dan daging sapi 15 ton yang diprediksi bisa sampai selesai lebaran. Jadi mulai awal Ramadan sampai lebaran stok daging ayam ini sudah mencukupi. (BAPPE-DA)



Yonif R631/Antang Jadi Satgas Pamwil Obvitnas PTFI

SATUAN Tugas Pengamanan Wilayah Objek Vital Nasional area PT Freeport Indonesia mengalami pergantian. Sebelumnya ditangani Yonif 405/Surya Kusuma, digantikan Yonif R 631/Antang dari Kota

Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upacara pelepasan dan penyambutan digelar Selasa (11/4/2023) lalu di Markas Kodim 1710/Mimika dipimpin langsung Komandan Korem 174/ATW Brigjen TNI Agus Widodo,



Prajurit Yonif R631/Antang mengajar anak-anak di Kampung Banti, Distrik Tembapapura

Foto: Bappeda



SIP MSi. Serah terima tugas ditandai dengan penandatanganan naskah oleh Danyonif 405/SK, Letkol Inf Kresna Santy Dharma dengan Dansatgas Yonif R 631/Atg Letkol Inf Dwi Harry Wibowo.

Brigjen TNI Agus Widodo meminta kepada Satgas R 631/Atg dengan personel 60 orang yang ditugaskan menjaga stabilitas keamanan di Papua khususnya di wilayah obvitnas harus menggunakan konsep pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dalam operasinya.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI M. Saleh Mustofa juga meminta agar prajurit selalu fokus dan mengerti tugas selama melaksanakan Satgas Operasi. "Tugas di Papua itu merupakan kebanggaan prajurit, Maka dari itu kita harus senantiasa

mencintai, menghormati, dan menjaga harkat dan martabat orang Papua," ujar Pangdam XVII/CEN.

Sehari setelah upacara serah terima, Satgas Yonif R 631/Atg langsung bergerak, bersinergi dengan Brimob Satgas Amole melakukan patrol pipa konsetrat PTFI. Ini sesuai arahan Panglima TNI yang meminta agar perenel memastikan tidak ada pipa yang bocor akibat pemotongan. Selain itu, Satgas Yonif R 631/Atg juga melaksanakan pengamanan pengawalan bus karyawan yang turun dari Tembagapura ke Timika.

Dansatgas Yonif R 631/Atg, Letkol Inf Dwi Harry Wibowo mengatakan aktivitas ini sekaligus sebagai wahana dan sarana memperkuat tali silaturahmi serta kebersamaan antara TNI-Polri yang selama ini sudah ter-



Foto: Bappeda



jalin dengan baik.

Tidak hanya bertugas mengamankan aktivitas operasi PTFI, Satgas Yonis R 631/Atg juga hadir di tengah-tengah masyarakat di sekitar area tambang PTFI. Seperti yang dilakukan prajurit TNI yang ditempatkan di Pos Banti yang mulai aktif memberikan penyuluhan wawasan kebangsaan serta mengajar anak-anak membaca dan menulis.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Dan SSK 1 Yonif R 631/Atg, Kapten Inf Sidiq Sumantri disambut baik anak-anak. Itu terlihat dari antusiasme dan ekspresi anak-anak yang sangat bahagia menerima penyuluhan dan pelajaran.

Kapten Inf Sidiq Sumantri menyebutkan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu te-

robosan Satgas Yonif R 631/Atg dalam upaya menanamkan kecintaan anak-anak terhadap Tanah Air serta meningkatkan kualitas belajar, khususnya anak-anak yang bersekolah di sekitar pos.

“Kami juga memberikan motivasi kepada anak-anak agar lebih rajin sekolah dan semangat untuk belajar menuntut ilmu agar ilmu yang di dapat bisa bermanfaat bagi masa depan diri sendiri, keluarga dan lingkungan,” kata Kapten Sidiq.

Ia menambahkan, pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tapi merupakan tanggungjawab bersama dalam memajukan dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tengah kehidupan global. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Musrenbang RKPD Tahun 2024



Musrenbang RKPD Tahun 2024





Perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah di Mimika





Mimika Membangun

